

2022

JURNAL AKUNTANSI MUHAMMADIYAH

P - ISSN 2087-9776

E - ISSN 2715-3134

JAM



Vol. 12 No. 2
Edisi: Juli – Desember 2022

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

- 1. PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT**
Silfia Sari & Noviyana
- 2. PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAL KABUPATEN ACEH BARAT**
Sri Wahyuni & Noviyana
- 3. AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA STUDI DI GAMPONG KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH**
Adnan & Muhammad Ichsan
- 4. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENYUSUTAN PADA PT.X**
Maksalmina
- 5. ANALISIS RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN CABANG MEULABOH**
Linda Wati & Rina Maulina
- 6. POTENSI EKONOMI KREATIF BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**
Seri Murni & Rini Khairuni
- 7. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA DKI JAKARTA**
Cut Fitrika Syawalina, Elviza & Eva Susanti
- 8. ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA KOPERASI UNIT DESA UJUNG RAJA TAHUN 2018-2020**
Rusnadi & Siska Azizah
- 9. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020**
Fathul Khaira, Zulkifli Umar, Tarmizi Gadeng & Cindi Yola
- 10. PENGARUH RASIO HUTANG TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 – 2020**
Intan Rizkia Chudri, Irmawati & Hasliza Razali

JAM

VOLUME
12

NOMOR
2

HALAMAN
117 - 226

BANDA ACEH
2022

P-ISSN 2087-9776
E-ISSN 2715-3134

DEWAN REDAKSI

PEMBINA

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Para Wakil Rektor Unmuha
3. Dekan Fakultas Ekonomi Unmuha

Penanggungjawab:

Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Aceh

Ketua Penyunting:

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak., CA.

Wakil Ketua Penyunting:

Eva Susanti, SE., M.Si., Ak., CA.

Penyunting Pelaksana:

1. **Dr. Dwi Cahyono, M.Si. Akt.** (Univ. Muhammadiyah Jember)
2. **Dr. Ramli Gadeng, M.Pd.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
3. **Dr. H. Aliamin, SE., M.Si., Ak.** (Univ. Syiah Kuala Banda Aceh)
4. **Dr. Sri Suyanta, M.Ag.** (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
5. **Taufik A Rahim, SE., M.Si., Ph.D.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)
6. **Drs.Tarmizi Gadeng, SE., M.Si. MM.** (Univ. Muhammadiyah Aceh)

Staf Pelaksana

1. Editor : **Irmawati, SE., M.Si., Ak.**
2. Adm.& Keuangan : **Rusnaldi, SE., M.Si.**
3. Distribusi & Pemasaran : **Elviza, SE., M.Si.**
4. Pengelola IT : **Devi Kumala, S.Si., M.Si.**

Diterbitkan oleh:

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh**

Jl. Muhammadiyah No. 91 Desa Batoh
Kecamatan Lueng Bata – Kota Banda Aceh

SEKAPUR SIRIH

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Eksistensi dan identitas sebuah Universitas dapat diukur dan dipahami dari kreasi ilmiah dari setiap elemen di universitas tersebut. Makin banyak dan berbobot karya ilmiah yang dihasilkan, makin tinggi pula eksistensi, pemahaman dan penghargaan orang terhadap perguruan tinggi yang bersangkutan. Kreasi Ilmiah diwujudkan dalam bentuk jurnal. Jurnal adalah sebagai alat komunikasi efektif dengan Stakeholder.

Salah satu kreasi ilmiah yang akan menjadi barometer bagi eksistensi, pemahaman dan penghargaan terhadap sebuah universitas adalah publikasi ilmiah baik yang dipublikasikan di berbagai jurnal maupun dalam bentuk *text book* yang dapat menjadi acuan bagi para mahasiswa dan siapapun yang berminat untuk memahami suatu fenomena ilmiah yang ditulis oleh civitas akademika universitas tersebut.

Berdasarkan perspektif inilah dan ditengah kelangkaan Civitas Akademika Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh melahirkan karya ilmiah berupa dalam bentuk Jurnal yang bernama Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM), kami amat apresiatif kepada Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Tim Redaksi dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mampu melahirkan salah satu karya yang cukup penting dalam rangka memberi dorongan dan motivasi untuk pengembangan wawasan para staf pengajar dalam penelitian-penelitian ke depan. Jurnal ini, disamping memperkaya khazanah keilmuan juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam studi ilmu akuntansi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi tidak hanya di Universitas Muhammadiyah Aceh akan tetapi juga diseluruh Universitas di Indonesia dan di luar negeri.

Rektor

Dr. Aslam Nur., M.A

SEKAPUR SIRIH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Pertama sekali tidak henti-hentinya secara tulus kita panjatkan puji dan syukur keharibaan Allah SWT yang telah memberi taufik, hidayah dan petunjukNya kepada kita semua sehingga dapat berbuat sesuatu yang selalu mendapat bimbingan sepenuhnya dari Allah SWT. Selanjutnya selawat beiring salam khusus kita persembahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajar dan mendidik ummat manusia sehingga mampu membuka mata hati kita semua dalam melaksanakan berbagai usaha dan kegiatan yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Pada Tahun 1991 Fakultas Ekonomi didirikan melalui melalui surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0230/1991 tanggal 29 April 1991 terdiri dari 2 (dua) program studi yaitu Program Studi Manajemen dan Akuntansi dan terakhir perpanjangan Izin Operasional Program Studi Akuntansi berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional No. 1630/D/T/K-I/2009 Tanggal 27 Maret 2009. Selanjutnya pada tahun 2015 Program Studi Akuntansi memperoleh hasil akreditasi "B" dari Badan Akreditasi Nasional berdasarkan Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 004/BAN-PT/Akred/S/I/2015 Tanggal 09 Januari 2015.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Program Studi Akuntansi membuat suatu program pengembangan penelitian staf pengajar/dosen dalam bentuk jurnal yang dinamakan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) dengan nomor P.ISSN 2087-9776 dan E.ISSN 2715-3134 yang dikeluarkan oleh PDII-LIPI serta diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yaitu edisi Januari-Juni dan Juli-Desember.

Dalam rangka penerbitan Jurnal ini, kami selalu membuka diri untuk menerima tulisan-tulisan bermutu, guna dapat kami muat dalam penerbitan-penerbitan berikutnya. Selaku Dekan, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim pengelola dan semua penulis yang telah menyumbangkan karya terbaiknya di jurnal ini sehingga Jurnal Akuntansi volume 12 no.2 Edisi Juli-Desember 2022 ini bisa terbit sebagai kelanjutan dari edisi sebelumnya. Diharapkan terbitan selanjutnya rekan-rekan dari perguruan tinggi Ekonomi khususnya Program Studi Akuntansi se-Indonesia agar dapat menyumbangkan hasil karyanya untuk dapat dimuat pada Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Semoga karya para penulis semuanya menjadi ilmu yang menginspirasi kebaikan dan kemanfaatan di dunia ilmu akuntansi.

Sebagai penghargaan perkenankanlah kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh pengelola Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) yang telah bekerja keras melakukan semua proses penerbitan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh, sehingga jurnal ini tampil dalam bentuk dan isi yang berkualitas. Dan akhir kata semoga Allah SWT selalu memberikan taufik dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita mampu menerbitkan Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh dengan sebaik-baiknya.

Dekan

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM.

DAFTAR ISI

Dewan Redaksi	i
Sekapur Sirih Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh	ii
Sekapur Sirih Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh	iii
Daftar Isi	iv
Pedoman Penulisan	v

Jurnal

1. PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN ACEH BARAT <i>Silfia Sari & Noviyana</i>	117-128
2. PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN HORTIKULTURAL KABUPATEN ACEH BARAT <i>Sri Wahyuni & Noviyana</i>	129-138
3. AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DESA STUDI DI GAMPONG KUTA ALAM KOTA BANDA ACEH <i>Adnan & Muhammad Ichsan</i>	139-146
4. ANALISIS PERENCANAAN PAJAK TERHADAP PENYUSUTAN PADA PT.X <i>Maksalmina</i>	147-156
5. ANALISIS RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO SOLVABILITAS DALAM MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA BPJS KESEHATAN CABANG MEULABOH <i>Linda Wati & Rina Maulina</i>	157-166
6. POTENSI EKONOMI KREATIF BERBASIS TEKNOLOGI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI ACEH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM <i>Seri Murni & Rini Khairuni</i>	167-182
7. ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM RANGKA MENJAGA DAN MENGELOLA BARANG MILIK NEGARA PADA BALAI HARTA PENINGGALAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK AZAZI MANUSIA DKI JAKARTA <i>Cut Fitrika Syawalina, Elviza & Eva Susanti</i>	183-194
8. ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK-ETAP PADA KOPERASI UNIT DESA UJUNG RAJA TAHUN 2018-2020 <i>Rusnaldi & Siska Azizah</i>	195-208
9. ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI ANGGARAN BELANJA PADA DINAS PANGAN ACEH TAHUN 2018-2020 <i>Fathul Khaira, Zulkifli Umar, Tarmizi Gadeng & Cindi Yola</i>	209-216
10. PENGARUH RASIO HUTANG TERHADAP RENTABILITAS PADA PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018 – 2020 <i>Intan Rizkia Chudri, Irmawati & Hasliza Razali</i>	217-226

METODE PENULISAN

BENTUK NASKAH

Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh menerima naskah dalam bentuk hasil penelitian (*Research Paper*) atau artikel ulasan (*Review*) dan resensi buku (*Book Review*), baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.

CARA PENGIRIMAN NASKAH

Penulis mengirimkan 2 (dua) eksemplar naskah serta CD berisi naskah tersebut ke alamat redaksi: Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Jl. Muhammadiyah No. 91 Banda Aceh 23245, Telepon 0651-21023, Fax. 0651-21023, e_mail: jurnalfeunmuha@yahoo.com.

FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim terdiri atas 15 s/d 20 halaman kuarto (A4) dengan spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Semua halaman naskah, termasuk tabel, lampiran, dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap tabel atau gambar diberi nomor urut, judul, dan sumber kutipan. Naskah dibuat dalam bentuk 2 kolom kecuali abstrak. Naskah diserahkan dalam bentuk hardcopy (*print out*) dan softcopy dalam CD. Sistematika penulisan disesuaikan dengan kategori artikel yang akan dipublikasikan di Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM) Aceh. Naskah yang masuk dikategorikan kedalam tiga kategori, artikel hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Sistematika penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut:

A. Sistematika Naskah Artikel Hasil Penelitian

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia lebih kurang 200 kata, dan disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan.

II. KAJIAN KEPUSTAKAAN

Berisikan referensi yang berhubungan dengan penelitian

III. METODE PENELITIAN

Berisikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, antara lain meliputi spesifikasi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan hasil penelitian dan pembahasan terhadap hasil penelitian

V. KESIMPULAN DAN SARAN

B. Sistematika Naskah Artikel Ulasan

Judul Naskah

Abstrak, dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan disertai dengan kata kunci (*key word*) maksimal 5 kata. Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

I. PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penelitian dan perumusan permasalahan

II. PEMBAHASAN

Berisikan pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah

III. KESIMPULAN DAN SARAN

C. Sistematika Naskah Artikel Resensi Buku

Naskah ditulis di atas kertas kuarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman, dengan spasi ganda.

Naskah dilengkapi dengan sac sampul buku dirensensi.

Sumber Kutipan

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan sistem catatan perut (*bodynote atau sidenote*).
2. Sumber kutipan yang berasal dari website ditulis dengan susunan sebagai berikut: Nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download.

Daftar Pustaka

Penulisan daftar Pustaka disusun alfabetis dengan susunan publisitas.

**PENGARUH PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN
HORTIKULTURA KABUPATEN
ACEH BARAT**

Silfia Sari¹, Noviyana²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar

*²Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat
Silfiasari01@gmail.com*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di bidang pertanian, tanaman pangan, dan hortikultura di Kabupaten Aceh Barat. Metodologi deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan data sekunder adalah dua bentuk informasi utama yang digunakan dalam penelitian. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat disurvei dengan menggunakan kuesioner terstruktur atau terdistribusi sebagai metode pengumpulan data primer, sedangkan laporan tahunan, laporan, dan laporan diperiksa untuk data sekunder berupa angka anak. Analisis regresi linier standar digunakan untuk analisis penelitian. Penganggaran berbasis kinerja terbukti secara signifikan meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Anggaran Berbasis Kinerja, Kinerja Pemerintah

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine how much influence the implementation of performance-based budgeting has on the accountability of government agencies in agriculture, food crops, and horticulture in Aceh Barat District. Quantitative descriptive methodology was used in this study. Primary data and secondary data are the two main forms of information used in research. Employees of the Agriculture Service of Aceh Barat Regency were surveyed using a structured or distributed questionnaire as the primary data collection method, while annual reports, reports, and reports were examined for secondary data in the form of child numbers. Standard linear regression analysis was used for research analysis. Performance-based budgeting is proven to significantly increase the accountability of government agencies in the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Aceh Regency.

Keywords : Transportability, Performance-Based Budgeting, Government Performance

PENDAHULUAN

Kinerja pegawai dapat sangat ditingkatkan dengan budaya akuntabilitas kinerja, karena merupakan salah satu kunci untuk mencapai tata kelola yang baik dalam pengelolaan organisasi publik dalam hal melacak dan mengidentifikasi asal-usul uang publik. Dan di luar itu, pencapaian sebuah instansi pemerintah. Dengan dimasukkannya akuntabilitas kinerja dalam organisasi sekarang diwajibkan oleh undang-undang atau norma-norma organisasi untuk melaksanakan tugas-tugas organisasinya sesuai dengan prestasi yang dicapai. (Bastian, 2010).

Kinerja anggaran didefinisikan oleh pemerintah sebagai hasil kerja suatu instansi pemerintah yang diukur terhadap anggaran untuk program dan kegiatan instansi tersebut baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Peraturan Menteri Keuangan No. 2 Tahun 2021 mendefinisikan kinerja anggaran sebagai pengeluaran aktual dari dana yang dialokasikan untuk masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah.

Pemerintah pusat dan daerah dituntut untuk berupaya mencapai tujuan organisasi sektor publik yang produktif, efisien, berkualitas, dan inovatif melalui Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut memungkinkan perubahan dilakukan pada cara pengelolaan dana daerah. Sebagai hasil dari undang-undang ini, pemerintah harus mematuhi standar akuntabilitas yang berfokus pada anggaran, kontrol akuntansi, dan sistem pelaporan.

Sesuai Permendagri No. 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah, dan dikembalikan ke Permendagri No. 1, anggaran kinerja dilaksanakan. Inpres Pengelolaan Daerah 21 Tahun 2011 menyarankan dibuatnya strategi akses anggaran kerja satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Memasukkan RKA-SKPD memastikan bahwa persyaratan keuangan terpenuhi dan tanggung jawab didasarkan pada hasil. Untuk mendapatkan hasil maksimal dari anggaran Anda, apakah itu anggaran berbasis kinerja atau anggaran tradisional, Anda perlu mendapatkan hasil terbaik. Istilah "penganggaran berbasis kinerja" mengacu pada pendekatan perencanaan keuangan yang mengutamakan pemantauan dan pengendalian pengeluaran.

Alokasi dana dievaluasi berdasarkan efikasi dan efisiensinya, dengan penekanan pada pembentukan korelasi langsung antara input dan output (Anggraini, 2010). Pengelolaan uang dan perencanaan pengeluaran dari perspektif perusahaan. Rencana yang telah Anda tetapkan dapat terancam jika anggaran Anda tidak diubah secara tepat dan efisien. Salah satu tantangan pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik adalah tidak adanya metrik yang digunakan untuk memantau keberhasilan. Penganggaran berbasis kinerja bertujuan untuk mengatasi hal tersebut (Mardiasmo, 2011).

Dalam bidang pertanian, termasuk Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Dinas Pertanian dan Hortikultura Tanaman Pangan. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten

Aceh Barat mempunyai tugas untuk mencapai tujuan tersebut, dan untuk itu Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Aceh Barat melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: Membuat rencana aksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan; Mengelola operasi layanan informasi pasar, menyebarkan peralatan dan teknologi pertanian sejalan dengan mandat hukum dan persyaratan praktis.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk meningkatkan produksi produk pertanian dengan mengawasi tindakan penyiapan bahan identifikasi, penggunaan sumber daya lahan, dan penggunaan air yang sejalan dengan agroekosistem. Melakukan pengawasan terhadap penyusunan dokumen kebijakan operasional yang sejalan dengan ketentuan dan persyaratan kerangka rehabilitasi dan konservasi lahan; Tetapkan tujuan untuk mengelola tanaman pangan dan serat, dan tugas yang terkait dengannya; Menilai kemajuan yang dicapai dalam mengelola pertanian untuk tanaman pangan dan palawija sambil juga melakukan tugas dan kegiatan administrasi lainnya yang diperlukan; Melaksanakan pengelolaan pertanian tanaman pangan dan palawija secara bersama-sama dengan unit kerja, instansi, lembaga, atau pihak ketiga lainnya;.

Melakukan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga/pihak lain dalam pengelolaan pertanian tanaman pangan dan palawija; memberikan pelatihan untuk meningkatkan hasil tanaman hortikultura; memberikan bimbingan pada pengolahan dan pemasaran koordinasi studi tanaman hortikultura, dorongan pendidikan, dan promosi kesadaran masyarakat merencanakan pertumbuhan profesional penyuluh dan lembaga penyuluhan; melaksanakan

kewajiban dinas tambahan yang dilimpahkan oleh bupati dalam lingkup tanggung jawab penyuluh.

Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa LKJIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura berfungsi sebagai sarana untuk meminta pertanggung-jawaban dinas atas kinerjanya dalam memajukan rencana pembangunan Kabupaten Aceh Barat, yang mencakup strategi pembangunan, tingkat pencapaian target, dan aktualisasi indikator kinerja utama yang diturunkan dari tujuan strategis. RPJM 2017-2022 Kabupaten Aceh Barat memuat target dan indikator kinerja terpilih berupa Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU), dimana indikator yang digunakan adalah indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian pembangunan yang dimaksud. tujuan, melalui perumusan strategi, kebijakan, dan program pembangunan.

Dua puluh satu (21) indikator kinerja dipilih sebagai benchmark oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat untuk mengevaluasi kemajuan menuju tiga tujuan pertumbuhan; dari jumlah tersebut, dua belas (12) dianggap berhasil. Target kinerja 2018-2019 yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat telah melampaui sejumlah metrik, yang diukur dengan perbandingan antara realisasi dan capaian kinerja. Tercatat ada 581 organisasi tani yang terbentuk karena liputan tersebut. Kedua, ada tiga penyuluh untuk setiap kelompok tani (1:3).

Ada peningkatan produktivitas sebesar 3,0%, yang berarti peningkatan sebesar 6,14 t/ha untuk beras dan bahan pangan lokal penting lainnya. Diperkirakan 115.820,27 metrik ton padi dipanen pada tahun 2014. 5. Jumlah jagung yang dipanen meningkat menjadi 639,58 metrik ton. Berkat

kerja keras para petani, penyuluh pertanian, pihak yang berkepentingan, dan pemerintah daerah, provinsi, dan federal yang bekerja sama, tujuan ini telah tercapai dengan sukses besar. BPS Kabupaten Aceh Barat masih dalam proses menghitung tiga indikator lagi; Ini mencakup kontribusi sektor, kontribusi Sektor Pertanian (Palawija), dan kontribusi organisasi petani. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat menemukan sembilan indikasi lagi yang belum tercapai.

Kemudian pada Tahun Anggaran 2021, 9 (sembilan) program utama akan melaksanakan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan dengan sasaran pencapaian 3 (tiga) tujuan, 3 (tiga) tujuan, dan 12 (dua belas) indikator kinerja berdasarkan identifikasi masalah internal dan eksternal. Dalam Bab III laporan LKjIP ini, kami menganalisis keberhasilan dan kegagalan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura wilayah Aceh Barat selama tahun 2021, serta capaian kinerja yang dicapai.

Bukti di lapangan menunjukkan bahwa sistem penganggaran di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat telah disusun, namun belum optimal sesuai dengan proses penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu, lembaga harus menggunakan penganggaran berbasis kinerja untuk menjamin bahwa anggaran yang telah dihasilkan dapat direalisasikan dengan cara yang konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Nanda dan Darwanis (2016) yang menemukan bahwa penganggaran berbasis kinerja di DPKKD Kabupaten Aceh Selatan masih menghadapi kendala, seperti anggaran yang diproyeksikan

tidak dilaksanakan secara maksimal sehingga berdampak pada evaluasi kinerja.

Temuan penelitian yang dilakukan oleh Raissa (2016) dengan judul “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” (di SKPD Kabupaten Magelang) menunjukkan bahwa sementara perencanaan dan pelaksanaan berdampak kecil terhadap akuntabilitas, pelaporan/pertanggung-jawaban kinerja instansi pemerintah dan evaluasi kinerja berpengaruh positif.

Mengingat masalah-masalah tersebut di atas, jelaslah bahwa metode penganggaran berbasis kinerja tidak konsisten ketika diterapkan di berbagai bidang dengan konsekuensi negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar penggunaan anggaran berbasis kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi.

KAJIAN PUSTAKAAN

Anggaran

Mardiasmo (2011) Penting untuk membedakan antara anggaran, yang merupakan pernyataan pekerjaan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditunjukkan dalam undang-undang keuangan dan proses penganggaran atau metode penganggaran itu sendiri. Abdul (2007)

Anggaran, dalam definisi yang paling dasar adalah rencana kuantitatif yang dikumpulkan dalam istilah moneter untuk periode anggaran, biasanya satu tahun.

Penganggaran berbasis kinerja

Mardiasmo (2011) Rencana pelaksanaan rencana pengeluaran didasarkan pada sasaran strategis dan taktis. Ini menyiratkan bahwa anggaran adalah alat untuk menyelesaikan sesuatu. Evaluasi hasil dalam hal seberapa baik hasilnya dibandingkan dengan proyeksi biaya dan anggaran Anda. Rencana Pelaksanaan adalah strategi untuk mencapai tujuan program yang meliputi anggaran, tindakan, dan ukuran pencapaian. Menurut aliran pemikiran ini, anggaran kinerja adalah suatu sistem yang menggabungkan kegiatan pemrograman dan evaluasi kinerja sebagai cara untuk mencapai tujuan, dan bahwa tujuan program terkait langsung dengan visi, tujuan, dan perencanaan strategis organisasi.

Manfaat Penganggaran Berbasis Kinerja

Kinerja Nilai anggaran kinerja bagi pemerintah dapat didiskusikan karena berbagai alasan:

1. Pemerintah menggunakan anggaran sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin stabilitas jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup warga negara.
2. Selama pasokan terbatas, kesenjangan antara permintaan dan sarana akan melebar. Kurangnya sumber daya (atau tempat tidur) memerlukan penganggaran, seperti halnya kemungkinan kebutuhan untuk mengisi kembali sumber daya tersebut.

3. Memiliki anggaran akan membuat pemerintah lebih akuntabel kepada rakyat. Anggaran publik digunakan di sini sebagai sarana untuk menegakkan tanggung jawab publik ke badan-badan pemerintah.

Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Mardiasmo (2011) siklus anggaran meliputi empat tahap, antara lain:

1. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)
Pengeluaran yang dianggarkan dihitung dari pendapatan yang diantisipasi. Dalam skenario ini, perkiraan pendapatan yang lebih tepat harus dibuat sebelum menetapkan perkiraan biaya.
2. Tahap Persetujuan (*Approval/Persetujuan*)
Hal ini membutuhkan melalui prosedur politik yang cukup rumit dan sulit untuk dipahami. Tidak ada "pembangunan aliansi" atau "delegasi penjualan" dalam manajemen eksekutif. Sangat penting bahwa moderator jujur dan siap untuk jangka waktu ini.
3. Tahap implementasi (implementasi)
Tahap selanjutnya adalah realisasi anggaran setelah disetujui oleh legislatif. Manajemen publik atas catatan keuangan dan prosedur administrasi merupakan pertimbangan paling kritis bagi manajer keuangan pada tahap pelaksanaan anggaran.
4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi
penilaian anggaran adalah tahap terakhir dari proses anggaran. Bagian operasional anggaran terkait dengan tahapan penyusunan, pengesahan dan pelaksanaan anggaran, sedangkan aspek akuntabilitas terkait dengan tahapan pelaporan dan penilaian.

Kelebihan Anggaran Berbasis Kinerja

Ada beberapa manfaat menggunakan anggaran berbasis kinerja, seperti yang dikemukakan oleh Deddi (2006):

1. Anggaran didasarkan pada kegiatan dengan hasil yang dapat diukur dan biaya yang diproyeksikan.
2. Dalam konteks ini, pengukuran output dan input ditekankan.
3. Legislatif membutuhkan informasi tentang bagaimana hal-hal akan berkontribusi atau

dikurangi dari jumlah yang diusulkan dalam anggaran kinerja.

4. Berikan otoritas tambahan kepada manajemen tingkat atas atas karyawan tingkat bawah.
5. Anggaran kinerja memberi bobot lebih pada hasil kegiatan yang didanai daripada jumlah dolar dari kegiatan tersebut.

Prinsip anggaran Berbasis Kinerja Abdul (2007) yang termasuk dalam prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah:

1. Akuntabilitas dan Keterbukaan Penganggaran,
2. Disiplin Penganggaran,
3. Perubahan Anggaran Berimbang.
 - a. Menghemat Uang dan Memaksimalkan Sumber Daya,
 - b. Diarahkan pada kinerja yang optimal.

I. METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai Mei 2022 di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat.

Jenis dan sumber data

Data primer dan data sekunder adalah dua bentuk informasi utama yang digunakan dalam penelitian. Data primer dikumpulkan melalui pemberian angket terstruktur atau disebarkan kepada pekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat, dan data sekunder dianalisis dengan melihat jumlah anak yang dilaporkan dalam berbagai Laporan Tahunan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat.

Populasi dan Sampel

Secara keseluruhan, 47 orang dilibatkan dalam analisis ini. Pengambil survei dipilih menggunakan strategi stratified random sampling. Sesuai dengan namanya, *purposive sampling* digunakan ketika data akan dikumpulkan dari kelompok yang telah ditentukan sebelumnya oleh

peneliti. Semua operasional dalam penelitian ini dilakukan dengan anggaran berbasis kinerja, dan semua responden telah bekerja di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat setidaknya selama satu tahun. Untuk alasan ini, peneliti memiliki 47 orang dalam sampel.

Metode Analisis Data

Penelitian deskriptif kuantitatif ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, "Sejauh mana penerapan anggaran berbasis dampak telah meningkatkan akuntabilitas Dinas Pertanian di Kabupaten Aceh Barat?" Statistik Uji asumsi konvensional, uji normalitas dan heteroskedastisitas, termasuk R² dan analisis regresi dasar, dan "uji parsial" sebagaimana digunakan (uji statistik t). digunakan dalam uji hipotesis. SPSS 20.0 digunakan untuk melakukan tes di komputer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

Analisis ini didasarkan pada tanggapan terhadap survei yang dikirimkan antara Januari dan Juni 2022. Beberapa survei yang dikembalikan tidak dapat diselesaikan karena responden tidak menjawab semua pertanyaan atau tidak menjawab pertanyaan yang diminta oleh laporan.

Tiga puluh empat dari 47 survei memiliki hasil positif, sedangkan 13 sisanya didiskualifikasi. Hasil pengujian (anggaran berbasis kinerja) menunjukkan bahwa X, variabel validitas, memiliki nilai signifikansi antara 0,000

dan 0,018, memenuhi ambang batas validitas pada tingkat 0,05. Tingkat signifikansi uji validitas variabel Y (tanggung jawab pelaksanaan) adalah antara 0,000 dan 0,028, yang berarti nilai tersebut signifikan secara statistik ($p < 0,05$). Dengan demikian, kata-kata survei mengungkapkan bagaimana organisasi pemerintah diselenggarakan secara finansial dan kinerja.

Tabel 1
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984a	,969	,968	2184737,96583

Sumber: output SPSS, Data diolah 2022

Berdasarkan uji koefisien determinasi, nilai koefisien korelasi (R) adalah $0,984 \times 100\% = 98,4\%$; angka ini menunjukkan korelasi atau hubungan positif antara variabel independen (penganggaran berbasis kinerja) dan variabel dependen (hasil anggaran) (keabadian). Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,969 dikalikan $100\% = 96,9\%$ menyiratkan bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh variabel-variabel pada tingkat tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor tambahan di luar ruang lingkup penelitian ini.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	26,221	8,846		4,606	,000
	Anggaran berbasis kinerja X	7,301	4,405	,704	6,428	,000

Sumber: output SPSS, Data diolah 2022

Tabel menunjukkan bahwa ketika banyak persamaan regresi linier diuji, hasilnya adalah:

$$Y = 26,221 + 7,301\beta X$$

- Jika variabel berbasis kinerja adalah tetap, maka anggaran pertanggungjawaban adalah 26.221, yang ditunjukkan dengan nilai konstanta sebesar 26.221.
- Sejauh mana X, koefisien regresi (penganggaran berbasis kinerja) Menurut 7.301, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dicapai melalui penggunaan anggaran berbasis kinerja (indikator X) (variabel Y).
- Dapat menyimpulkan bahwa tanda positif menunjukkan hubungan satu arah antara X dan Y, sedangkan tanda negatif menunjukkan kebalikannya (Y).

Karena ada dua kelompok yang diuji, maka digunakan uji-t dengan taraf signifikansi $\alpha 0,05$ dan hasilnya akan dibandingkan dengan menggunakan thitung dan ttabel dengan derajat kebebasan ($df = n-2$) dan selang kepercayaan (CI) sebesar 95%.

Maka dapat disimpulkan:

- H_1 : Akuntansi untuk hasil dipengaruhi oleh penganggaran kinerja. Karena H_0 berada di dalam rentang yang diizinkan dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6,428 > 2,03693$), menerima H_1 . Nilai ttabel (46) yang diperoleh adalah 2.03693. Ini menyiratkan bahwa penganggaran berbasis kinerja sangat berdampak pada tanggung jawab atas hasil. Kedua nilai signifikansi turunan adalah 0,000, yang berarti probabilitas secara signifikan lebih kecil dari 0,025. Jika H_1 benar, atau jika anggaran kinerja secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas kinerja, maka anggaran kinerja harus diadopsi.

2. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan /Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

- a. Peningkatan produksi melalui metode intensifikasi dengan menerapkan teknologi tepat guna yaitu dengan menggunakan benih unggul, pemberantasan hama dan penyakit yang ramah lingkungan, pemupukan berimbang, dan pengairan sesuai kebutuhan, dapat dilihat dengan program/kegiatan yang mendukung metode ini seperti halnya kegiatan penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian baik dari Dana APBK maupun APBN seperti pembangunan saluran irigasi air tanah dalam (sumur bor), program penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dengan kegiatannya, Pengelolaan Sistem Pengadaan dan Pengadaan Alat Mesin Pertanian, Dukungan Manajemen, dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan dengan Pengelolaan Produksi Aneka Biji dan Umbi, Pengelolaan Tanaman Pangan Produksi Tanaman Sereal, dan Kegiatan Pengelolaan dan Penunjang Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- b. Peningkatan produksi juga diupayakan melalui Demonstrasi Plot (Demplot) atau percontohan agar dapat dilihat langsung oleh petani perbedaan hasil bila dilakukan dengan menggunakan metode teknologi tepat guna dengan tanpa sentuhan teknologi tepat guna;
- c. Peningkatan Produksi juga dapat dicapai dengan metode meningkatkan Indeks Penanaman (IP) dengan luas lahan yang sama, namun memaksimalkan luas tanam di dua musim tanam, yaitu musim tanam (MT) gadu, terhitung mulai bulan Mei sampai dengan Juli dan musim tanam (MT) rendengan, terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember;
- d. Peningkatan Produksi dipengaruhi oleh adanya Upaya Khusus (UPSUS) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dimana Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilibatkan langsung melakukan pendampingan dan pembinaan bersama Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terhadap kelompok-kelompok tani yang tersebar diseluruh gampong dalam wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- e. Peningkatan produksi juga tidak terlepas dari adanya pembinaan, penyuluhan untuk merubah perilaku petani dari tidak mau, menjadi mau melaksanakan/ mengadopsi teknologi tepat guna;
- f. Sarana Produksi (Saprodi) yang sangat dibutuhkan dalam peningkatan produksi terus diupayakan ketersediaannya, baik dari sumber dana APBK, APBA maupun APBN;
- g. Mendayagunakan traktor besar 4 WD untuk memacu peningkatan luasan tanam disetiap musim tanam baik MT gadu maupun MT rendengan juga untuk dapat seluas mungkin tanam serentak agar dapat terhindar dari serangan hama dan penyakit, ketersediaan *hand traktor* disetiap gampong yang masih

relatif kurang sehingga tidak tercapainya tanam serentak;

- h. Stok brigade obat-obatan baik tanaman pangan untuk mengantisipasi serangan hama penyakit dengan skala besar.

3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

Masih terdapat beberapa kendala dan kekurangan yang menghambat kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan tujuan Renstra dan RPJM. Kemajuan teoretis dan teknis dalam penggunaan peralatan dan sumber daya petani terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja; Kemajuan tersebut menjadi pedoman dalam menjalankan peran dan tanggung jawab utama para pelaku dan pelaksana dalam industri budidaya tanaman pangan dan hortikultura.

Kabupaten Aceh Barat dikenal dengan pertaniannya yang kuat, otonom, dan hortikultura, dan berharap dapat memperluas hasil pertaniannya dengan memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja manusianya dengan lebih baik. Kabupaten Aceh Barat harus berdedikasi dan serius dalam upaya memperkuat sumber daya manusianya, bekerja keras dan bekerja dengan tenaga kerja yang ditetapkan oleh Renstra dan RPJM, serta menyediakan kebutuhan pegawai dan masyarakat sesuai dengan Renstra dan RPJM.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat

Untuk memaksimalkan efisiensi, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat telah memasukkan sejumlah program dan kegiatan dalam rencana pelaksanaan anggarannya. Program Pemberdayaan Bidang Pertanian, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian dan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, semuanya vital bagi terwujudnya visi dan pemenuhan misi.

Berikut ini adalah beberapa contoh inisiatif dan kegiatan luas yang akan membantu keberhasilan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2021.

- a. Berikut ini adalah spesifik dari sembilan kegiatan Program Layanan Administrasi Perkantoran yang 97,76% telah diselesaikan:
 - 1) Tuntutan untuk layanan surat untuk jangka waktu 12 bulan dapat dipenuhi dengan layanan yang disediakan.
 - 2) Kebutuhan 12 bulan dapat dipenuhi dengan layanan komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan selama dua belas bulan.
 - 3) Tuntutan 12 bulan mendatang dapat dipenuhi dengan penyediaan jasa administrasi keuangan;
 - 4) Memasok perlengkapan kantor yang cukup untuk bertahan setahun sudah cukup;

- 5) Menyediakan salinan informasi tercetak yang cukup untuk bertahan selama satu tahun.
- 6) Komitmen waktu 12 bulan;
- 7) Semua persyaratan instalasi listrik dan penerangan gedung perkantoran dapat dipenuhi selama setahun penuh jika bertanggung jawab untuk menyediakan bagian-bagian tersebut. Kebutuhan bahan bacaan dan kode hukum selama 12 bulan dapat dipenuhi dengan persediaan selama satu tahun;
- 8) Makanan dan minuman selama 12 bulan dapat menopang seseorang selama itu;
- 9) Untuk mengatasi tuntutan untuk jangka waktu 12 bulan, rapat koordinasi dan diskusi sudah cukup;
- b. Lima langkah yang membentuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur adalah sebagai berikut:
 - 1) Sebagian besar rencana pembelian perabot kantor telah selesai (98%).
 - 2) Pembangunan/perbaikan BPP di kecamatan terealisasi 97,81%.
 - 3) Sukses total (100%) dalam melakukan pemeliharaan rutin dan berkala pada struktur komersial.
 - 4) Tingkat keberhasilan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mencapai 99,62% Tingkat.
 - 5) target pemeliharaan rutin/berkala mesin gedung perkantoran mencapai 99,92%.
- c. Hanya ada satu komponen dalam Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur:
 - 1) Penyusunan kredit point dan akreditasi penyuluh terealisasi 100%.
- d. Inisiatif untuk Memajukan Kecanggihan Pelaporan Kinerja dan Keberhasilan Finansial
 - 1) ringkasan dan analisis laporan kinerja SKPD.tugas yang diselesaikan dengan sempurna (100%);
- e. Tiga upaya berbeda membentuk Program Peningkatan Kesejahteraan Petani:
 - 1) Peningkatan kemampuan lembaga petani terealisasi 100%
 - 2) Pelatihan petani dan pelaku budidaya tanaman pangan/hortikultura terealisasi 99,30%.
 - 3) Penilaian BPP, petani berprestasi dan pengukuhan kelompok tani terealisasi 99,20%.
- f. Secara keseluruhan, Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan melibatkan dua inisiatif berbeda:
 - 1) Intensifikasi budidaya padi telah berjalan, memungkinkan palawija mencapai tingkat keberhasilan 95,82%.
 - 2) Ada tingkat keberhasilan 97,79% dalam mengembangkan dan mengintensifkan tanaman hortikultura.
- g. Berikut adalah rincian dari 5 komponen yang membentuk Program Peningkatan Teknologi Pertanian/Perkebunan:
 - 1) Infrastruktur yang diperlukan dan sumber daya teknologi untuk pertanian dan perkebunan dibeli, terhitung 96,43 % dari total.
 - 2) Servis rutin dan berkala terhadap mesin-mesin yang digunakan untuk menanam dan mengolah tanaman telah selesai dengan rata-rata 99,63 persen.

- 3) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan mesin panen dan pengolah hasil pertanian terealisasi 99,64%.
 - 4) Pembangunan/perbaikan sumber-sumber air terealisasi 100%.
 - 5) Manajemen pelaksanaan kegiatan DAK fisik pertanian terealisasi 73,98%.
- h. Berikut 11 langkah yang membentuk Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan:
- 1) Berdasarkan saran yang diberikan, hasil pertanian dan perkebunan meningkat sebesar 97,52%.
 - 2) Tingkat keberhasilan pembuatan bibit unggul untuk pertanian dan perkebunan adalah 92,07%.
 - 3) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan. (Sharing APBN PSP) terealisasi 63,05%.
 - 4) Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (Otsus) terealisasi 97,23%
 - 5) Pengendalian hama pertanian/perkebunan terealisasi 100%
 - 6) Pembangunan jalan usaha tani tanaman pangan terealisasi 100%
 - 7) Pengelolaan bibit unggul pertanian terealisasi 83,97%
 - 8) Penyediaan sarana produksi pertanian tanaman pangan (Sharing APBN) 99,66%
 - 9) Penyusunan data statistik pertanian terealisasi 99,26%.
 - 10) Pembangunan jalan usaha tani terealisasi 57,68%.
 - 11) Pemeliharaan dan perlindungan tanaman pangan dari serangan hama dan penyakit terealisasi 99,35%.
- i. Program Penyuluhan Pertanian/Perkebunan ada dua komponen:

- 1) Penyusunan program penyuluhan terealisasi 100%.
- 2) Pemberdayaan BPP kecamatan terealisasi 100%

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Temuan berikut dapat diambil dari studi dan analisis data yang dikumpulkan melalui kuesioner: Akuntabilitas positif untuk kinerja instansi pemerintah Dinas Pertanian Aceh Barat yang dikenai anggaran berbasis kinerja ditemukan melalui penggunaan koefisien determinasi, atau R-kuadrat, diperoleh melalui pengujian. Temuan uji regresi sederhana menunjukkan hubungan yang menguntungkan dan signifikan secara statistik antara kinerja anggaran dan akuntabilitas dengan efisiensi instansi pemerintah.

Saran

1. Ringkasan atau laporan tahunan harus dibuat oleh Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Barat sepanjang tahun, atau laporan terpisah harus dibuat setiap tahun sebagai salah satu tindakan yang terdokumentasi. Jika laporan dikirim ke Dinas Pertanian Provinsi dan Pusat, hal ini dapat membantu orang yang membacanya mendapatkan informasi yang mereka butuhkan untuk kelas dan pekerjaan rumah dengan lebih cepat.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain, seperti kepemimpinan, keseragaman dalam penegakan hukum, dan pola yang terukur, yang semuanya berdampak pada akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah.

REFERENSI

- Abdul Halim . 2007. *Pengelolaan keuangan daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN
- Bahri, Syambudi Prasetia. 2012. *Dampak Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Dinas Pendapatan dan Keuangan Kota Cirebon)*. Universitas Pasundan. Bandung
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Jakarta*: Salemba Empat.
- Haspiart. 2012. *Dampak Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Pusdiklat Badan Pemeriksa Keuangan/Pengawas Keuangan dan Pembangunan*, Edisi Keenam. Tentang Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia / Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). 2008. *Penelitian Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Indonesia*.
- Mardiasmo 2011. *Otonomi Daerah dan Pengelolaan Keuangan*. Yogyakarta: BEBERAPA.
- Menteri Dalam Negeri, Peraturan No. 13 Tahun 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2 Jakarta*: Salemba Empat.
- Nordiawan. 2006. *Industri akuntansi Setiap orang*. Jakarta: Salemba Empat.
- Organisasi Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2008. *Pengukuran Kinerja, Tinjauan Dealer Status*. ibukota Jakarta.
- Permendagri Edisi 2007, Permendagri Edisi 13 mengatur tentang Revisi 2006 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *tentang Pengelolaan Daerah*.
- Sugiyono 2010. *Metodologi Penelitian Bisnis*, CV. Bandung: Alfabet
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Jakarta*: